

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia saat ini terus meningkatkan sistem kinerja dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut dilaksanakan salah satunya dengan melakukan pengelolaan administrasi publik yang lebih baik dan sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada unit pemerintahan yang lebih kecil, antara lain Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut setiap aparatur atau unit pemerintahan yang lebih kecil diharuskan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Semua ini berdampak pada tuntutan yang tinggi terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah, mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Ukuran kinerja yang tidak hanya menggunakan satu ukuran saja dan perlu menggunakan beberapa ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam unit kerja (Mardiasmo, 2009 : 1 ).

Menganalisa kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan

APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari suatu periode untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga pemerintah dapat mengetahui kecenderungan yang terjadi. Dengan menganalisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, dan mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan pemerintah dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Abdul Halim, 2007 : 20).

Manajemen keuangan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah salah satunya yang memiliki kewajiban mengelola keuangan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, APBD juga ditetapkan menggunakan peraturan daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai akhir tahun 31 Desember.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan organisasi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, perencanaan kerja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerjanya. Salah satunya merupakan perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

digunakan untuk tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya.

Perencanaan anggaran daerah sangat penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan agar anggaran yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, dan untuk membiayai semua kebutuhan yang dijalankan serta dapat terealisasi dengan sesuai yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sudah terealisasi dari rencana anggaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari perencanaan anggaran, karenanya laporan tersebut akan memberikan informasi mengenai hasil yang telah berhasil atau tidaknya kinerja pemerintah yang berdasarkan realisasi APBD. Informasi tersebut yang nantinya akan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun selanjutnya.

Anggaran merupakan salah satu instrumen yang cukup berperan penting dalam organisasi sektor publik, karena sifatnya partisipatif. Hal ini dapat melibatkan masyarakat dan perencanaannya, agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam anggaran. Anggaran juga diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk melaksanakan rencana kegiatan yang sudah dibentuk, baik mengenai perolehan pendapatan dan belanja daerah. Pada DPPKA Kota Mojokerto sering terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran belanja daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan defisit atau surplus sehingga berpengaruh pada periode berjalan

berikutnya. Sehingga penelitian ini mengambil judul “**Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada DPPKA Kota Mojokerto**”

### **Penjelasan Judul**

Menghindari dengan adanya salah penafsiran judul maka dengan ini akan dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai arti setiap kata. Adapun penjelasannya antara lain :

#### **ANALISIS**

Kegiatan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan yang mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dapat digolongkan atau dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu yang kemudian dapat dicari dengan kaitannya dan ditafsirkan maknanya

#### **KINERJA**

Suatu hasil kerja secara kuantitas yang cara kualitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tanggung jawan yang telah diberikan.

#### **ANGGARAN**

Suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan.

#### **PENDAPATAN**

Penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa (fees), bunga,

dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting, karena pendapatan itu yang menjadi objek atas kegiatan perusahaan.

## **BELANJA**

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana daerah dalam suatu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

## **DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO**

Organisasi atau perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi pemerintahan.

Jadi dari penjelasan judul secara keseluruhan merupakan untuk mengurai, mengolah, dan menganalisa secara sistematis dan objektif mengenai pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Mojokerto.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pendapatan pada DPPKA Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014 – 2016 ?
2. Bagaimana kinerja belanja pada DPPKA Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014 – 2016 ?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui kinerja pendapatan pada DPPKA Kota Mojokerto tahun Anggaran 2014 – 2016.
2. Mengetahui kinerja belanja pada DPPKA Kota Mojokerto tahun Anggaran 2014 – 2016.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Membantu meningkatkan pemahaman mengenai anggaran pendapatan dan belanja, membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam anggaran belanja.
2. Bagi Perguruan Tinggi  
Mengurangi kurangnya keakuratan dalam hal yang menyediakan informasi mengenai pemerintah daerah dalam pendapatan dan belanja daerah pemerintahan yang tersedia di dalam perpustakaan STIE Perbanas Surabaya
3. Bagi adik tingkat yang berkepentingan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bidang pendapatan dan anggaran. Dapat menggunakan tugas akhir ini untuk menambah wawasan maupun sebagai acuan membuat penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Metode penelitian**

Merupakan pengumpulan data dan informasi menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

## 1. Metode Pengelompokan Data

Metode ini menggunakan antara lain interview, dokumentasi, dan observasi dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Wawancara dilaksanakan dengan pegawai di bagian bendahara pengeluaran pada bidang penganggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

## 2. Metode Analisis Deskriptif

Merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, antara lain :

- a. Mengumpulkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014 – 2016 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dan melakukan perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan APBD, di antaranya menggunakan rasio seperti: analisis varians (selisih) pendapatan, analisis belanja langsung, analisis belanja tidak langsung dan analisis efisiensi belanja.
- b. Membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dan dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga akan mendapatkan hasil yang diketahui, dengan bagaimana efisiensi kinerja yang telah terjadi pada kinerja realisasi belanja.
- c. Membuat kesimpulan.